

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*), dari sudut pandang bahasa (*etimologi*) terdiri atas dua kata, yaitu *agri* atau *ager* yang berarti tanah dan *culture* atau *colere* yang berarti pengelolaan. Jadi pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) diartikan sebagai kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang kesemuanya itu untuk kelangsungan hidup manusia (Nisa, 2016).

Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang strategis karena sampai saat ini sektor pertanian merupakan sektor yang paling diunggulkan. Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan perekonomian nasional karena sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Bahkan, sampai saat ini sebagian besar pertanian masih bertumpu pada sektor tanaman pangan. Data tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Wonogiri produktivitas padi pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan produktivitas rata-rata 5,62 ton per hektar pada tahun 2017 turun menjadi 5,46 ton per hektar pada tahun 2018. Dari data ditabel 1 dapat dilihat merupakan hasil dari sektor pertanian pangan padi berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018.

Tabel 1. Produksi hasil pertanian padi di Kabupaten Wonogiri tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Pracimantoro	5.208,50	24.159,55	4,64
2	Paranggupito	2.016,00	7.527,90	3,60
3	Giritontro	1.883,72	8.190,25	4,35
4	Giriwoyo	5.967,80	30.428,78	5,10
5	Batuwarno	1.739,43	8.424,96	4,84
6	Karangtengah	1.726,22	8.557,49	4,96
7	Tirtomoyo	4.095,29	24.405,23	5,96
8	Nguntoronadi	2.635,74	13.803,49	5,24
9	Baturetno	2.631,17	15.954,30	6,06
10	Eromoko	6.061,32	31.119,23	5,13
11	Wuryantoro	2.541,70	14.259,74	5,61
12	Manyaran	3.081,68	17.273,62	5,61
13	Selogiri	4.203,42	25.709,04	6,12
14	Wonogiri	2.013,42	11.833,81	5,88
15	Ngadirojo	4.060,39	23.258,98	5,73
16	Sidoharjo	3.855,71	21.507,39	5,58
17	Jatiroto	1.451,90	7.955,40	5,48
18	Kismantoro	2.070,67	11.710,79	5,66
19	Purwantoro	2.870,17	16.576,84	5,78
20	Bulukerto	2.118,06	12.415,03	5,86
21	Puhpelem	1.132,37	6.379,28	5,63
22	Slogohimo	3.563,42	20.567,19	5,77
23	Jatisrono	3.094,40	17.888,69	5,78
24	Jatipurno	2.396,48	15.029,82	6,27
25	Girimarto	3.733,46	21.969,66	5,88
Jumlah		76.152,45	416.906,47	5,46

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang penting untuk kelangsungan pertumbuhan tanaman. Pemupukan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kekurangan dalam pemupukan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kekurangan pupuk bisa terjadi dikarenakan petani kesulitan mendapatkan pupuk. Kesulitan tersebut terjadi karena seringnya terjadi fenomena lonjakan harga dan langkanya pasokan pupuk ditingkat petani. Kebijakan subsidi pupuk menjadi

salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi fenomena lonjakan harga dan langkanya pasokan pupuk untuk petani, namun seringkali subsidi tanpa adanya pengawasan akan menjadikan pendistribusian pupuk tidak tepat sasaran.

Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan pupuk adalah dengan meluncurkan Program Kartu Tani. Program Kartu Tani merupakan program baru yang dibuat oleh Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi kepada sasaran yang berhak menerima pupuk bersubsidi dengan membuat aplikasi sistem informasi pertanian Indonesia. Program Kartu Tani diharapkan dapat mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran dan membantu petani dalam mengelola usahatannya dengan berbagai fasilitas perbankan yang diberikan, serta bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah (Ardhiansyah, M. H. 2018).

Kartu tani merupakan sebuah alat yang digunakan petani untuk menebus pupuk bersubsidi. Selain itu, kartu tani dapat digunakan sebagai tabungan bagi petani, tarik tunai, belanja sehari-hari, pembayaran tagihan dan transfer antar bank. Untuk mendapatkan kartu tani petani harus tergabung dalam kelompok tani. Jenis dan jumlah pupuk subsidi yang diterima petani melalui kartu tani sesuai dengan luas lahan, komoditas dan jenis pupuk yang disusun melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) oleh penyuluh bersama petani yang kemudian di upload ke Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (Jorgi *et al.*, 2019)

Kartu tani bisa disebut juga kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi

pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di Pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Manfaat dari kartu tani yaitu terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani di Jawa Tengah (Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah 2017).

Kebijakan subsidi periode 2015-2017 yang berdasarkan pada kebijakan belanja pemerintah, khususnya di bidang belanja subsidi lebih menekankan pada belanja subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran. Implementasi kebijakan subsidi yang ditempuh perlu didukung oleh pemerintah dengan pendataan penduduk dan statistik pelaporan yang baik. Pemerintah daerah dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran (Munawar, 2013).

Di Kabupaten Wonogiri sendiri telah membagikan kartu tani kepada petani yang sudah mendaftarkan diri melalui kelompok tani. Melalui Kartu tersebut para petani yang telah terdaftar dalam kelompok tani akan menerima pupuk sesuai jatah alokasi yang tercantum dalam sistem. Disatu sisi manfaat lainnya adalah untuk mengedukasi petani tentang pentingnya mengelola keuangan karena terintegrasi dengan perbankan. Dengan demikian, dikalangan petani diharapkan bisa tumbuh budaya menabung dan tidak konsumtif setelah menerima pembayaran hasil komoditas. Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memberikan perlindungan terhadap masyarakat

berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Permasalahan yang ada dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terkadang belum tepat sesuai dengan 6 aspek tepat (jumlah, waktu, jenis, tempat, mutu dan harga) di buatnya kartu tani sebagai contoh pendistribusian pupuk mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan waktu pemupukan yang telah dijadwalkan oleh petani menjadi tidak tepat waktu, kemudian jumlah pupuk yang diterima petani tidak sesuai dengan lahan yang akan digarap, serta jenis pupuk yang di distribusikan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan petani.

B. Tujuan

1. Mendiskripsikan karakteristik petani yang menggunakan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Mengetahui persepsi petani terhadap kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

C. Kegunaan

1. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak atau instansi terkait dengan pengembangan kartu tani.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan subsidi pupuk menggunakan kartu tani di Kabupaten Wonogiri.